

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

#### LAPORAN TRIWULAN 1 TPID DIY

Data Inflasi Kota Yogyakarta 2022 Wilayah Inflasi Januari Februari Maret Kota Yogyakarta 0,59% 0,05% 0,77% Nasional 2,18% 2,06% 2,64% • Kota Yogyakarta pada Bulan Januari 2022 mengalami inflasi sebesar 0,59 persen yang disebabkan naiknya indeks harga konsumen kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,16 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,34 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,97 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,03 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,20 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,05 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,03 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,08 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,15 persen. Kelompok yang mengalami deflasi yaitu kelompok transportasi sebesar 0,03 persen; dan kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,10 persen • Sementara Kota Yogyakarta pada Bulan Februari 2022 mengalami inflasi sebesar 0,05 persen yang disebabkan naiknya indeks harga konsumen kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,29 persen, kelompok perumahan, air dan listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,02 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,37 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,19 persen; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,02 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,06 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,97 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,47. Kelompok yang mengalami deflasi yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,18 persen; kelompok transportasi sebesar 0,35 persen; sedangkan kelompok pendidikan relative stabil. • Kota Yogyakarta pada Bulan Maret 2022 mengalami inflasi sebesar 0,77 persen yang disebabkan naiknya indeks harga konsumen kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,39 persen; Kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,35 kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,37 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,75; kelompok kesehatan sebesar 0,01 persen; kelompok transportasi sebesar 0,96 persen; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,02 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,07 persen; kelompok penyedia makanan, minuman/restoran sebesar 0,87 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,49 persen; Adapun kelompok yang relatif stabil yaitu kelompok pendidikan.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Kenaikan tarif rokok secara bertahap, sebagai akibat dari keputusan pemerintah menaikkan cukai rokok secara rata-rata mencapai 12% (yoy) per 1 Januari 2022.
2. Harga emas global berfluktuasi dengan arah yang cenderung meningkat. Hal ini disebabkan oleh inflasi global dan sebaran Covid-19 yang meningkat.
3. Harga gula pasir secara nasional mengalami peningkatan seiring pasokan milik pemerintah/ BUMN yang menipis. Meskipun demikian kenaikan bersifat temporer sejalan dengan rencana realisasi impor gula. Berdasarkan data APTRI, pemerintah akan mengimpor gula mentah dan gula kristal putih (GKP) untuk kebutuhan konsumsi lebih

dari 900.000 ton pada tahun ini.

4. Tarif bahan bakar rumah tangga diperkirakan meningkat. Pemerintah kembali melakukan penyesuaian harga LPG nonsubsidi pada 27 Februari 2022. Penyesuaian ini merupakan kali kedua dalam tiga bulan terakhir sejak yang pertama pada 25 Desember 2021. Ke depan, harga LPG 3 kg diperkirakan juga akan mengalami kenaikan akibat rencana perubahan skema pemberian subsidi melalui bantuan langsung, menggantikan skema existing yang bersifat terbuka (dapat diakses seluruh golongan masyarakat).
5. Harga Bawang Merah mengalami peningkatan yang dipengaruhi oleh berkurangnya pasokan seiring dengan berakhirnya masa panen pada triwulan IV. Hal ini sesuai dengan siklus produksi bawang merah DIY yang paling rendah pada triwulan I seiring siklus tanam.
6. Sejalan dengan normalisasi permintaan pasca berakhirnya periode Nataru dan libur akhir tahun, harga cabai merah di pasaran mengalami penurunan. Meskipun demikian, DIY kini mengalami masa musim hujan dengan tingkat curah hujan yang menengah. Saat ini petani sedang berada dalam periode masa tanam yang berimplikasi pada turunnya pasokan cabai. Jika pasokan terus-menerus turun, dapat berdampak terhadap meningkatnya harga cabai di pasaran.
7. Peningkatan ekspektasi inflasi, sejalan dengan ekspektasi perbaikan ekonomi dan permintaan masyarakat di tengah mobilitas masyarakat yang berangsur-angsur pulih akibat relaksasi restriksi penanganan pandemi kondisi Covid-19.
8. Kenaikan harga komoditas pangan global yang berpotensi mendorong kenaikan harga domestik, antara lain kenaikan harga komoditas kedelai global yang berpotensi mendorong kenaikan harga tahu dan tempe.

### 3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Operasi pasar dan pasar murah terus dilakukan untuk menjaga harga komoditas pokok berada di level yang ideal.
2. Mengarahkan bantuan sosial kepada masyarakat untuk dibelanjakan pada UMKM dan produk dalam DIY
3. Optimalisasi teknologi digital untuk peningkatan produktivitas pangan dan efisiensi distribusi. Dalam era digital ini, pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga. Beberapa inovasi seperti smart farming, pasar lelang komoditas digital dipanen.id, dan perluasan akses pasar melalui e-commerce perlu terus didorong, karena telah terbukti mampu meningkatkan produksi dan efisiensi.
4. Melakukan kerja sama antar daerah untuk mendapatkan prioritas pasokan komoditas pokok untuk menjaga stabilitas pasokan.
5. Mencari mitra dagang sebagai off taker, utamanya pada komoditas yang mengalami fluktuasi pada saat panen raya.
6. Selalu menjaga kecukupan stok cadangan pangan pemerintah.
7. Hilirisasi produk-produk pertanian untuk menjaga daya tahan produk serta meningkatkan nilai tambah bagi petani.
8. TPID DIY melakukan penjajakan perdagangan antardaerah, sebagai bentuk komitmen menjaga kelancaran arus barang pada saat kondisi pasokan berlebih maupun kekurangan.
9. Melakukan kajian pembentukan BUMD Pangan, untuk menyerap pasokan pasar secara berlebih dan menjadi cadangan pemerintah daerah untuk melakukan intervensi ketika stok di pasar berkurang.
10. Memastikan angkutan logistik tetap beroperasi secara lancar pada saat pengetatan mobilitas.

Memastikan tidak adanya penimbunan dan markup harga berlebih, utamanya pada

11.

saat lonjakan permintaan seperti saat lebaran dan tahun baru.

12. Adanya bantuan dari pemda melalui APBD untuk penyediaan ongkos kirim gratis bagi pembelian bahan pangan pokok dari Toko Mitra Tani menggunakan layanan pengiriman daring.

13. Mendorong konsumsi secara bijak. Dalam hal ini TPID DIY melakukan himbauan secara terus menerus untuk belanja ingat tetangga. Belanja di warung sekitar rumah menjadi cara sederhana untuk menjaga keberlangsungan usaha UMKM yang terdampak pandemi. Selain itu perlu terus digaungkan semangat gotong royong. Di mana kegiatan belanja tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, namun perlu belanja untuk membantu kebutuhan tetangga sekitar yang dirasa perlu.

14. Upaya edukasi masyarakat untuk belanja secara daring. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat namun dengan tetap menjaga protokol kesehatan yang ditetapkan.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Hasil pemantauan yang dilakukan oleh beberapa instansi memberikan variasi informasi yang dapat memberikan gambaran yang ada di lapangan
- Perlu upaya menjaga kelebihan pasokan di tingkat produsen untuk menjaga pula harga di tingkat produsen

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Diharapkan bahwa kegiatan pengendalian inflasi tidak hanya bersifat *symptomatic action*, namun merupakan kegiatan yang berkesinambungan dengan rencana pencapaian yang terukur;
2. Pengendalian distribusi komoditi disesuaikan dengan kebutuhan pasokan untuk wilayah DIY;
3. Perlunya kerja sama antar daerah untuk mendukung program 4K (Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Keterjangkauan Harga dan Komunikasi Efektif) pengendalian inflasi daerah;